

Evaluasi Program Predator Kabupaten Sumedang

Predator Program Evaluation In Sumedang District

Dhesti Widya Nurhasanah Ningrum* & M. Zamzami

Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas April, Indonesia

Diterima: 26 Maret 2022; Direview: 26 Maret 2022; Disetujui: 15 Mei 2022

*Corresponding Email: dhesti_widya@unsap.ac

Abstrak

Program Pelayanan Perekaman KTP Elektronik Bersepeda Motor (PREDATOR) merupakan salah satu program inovasi yang memiliki tujuan agar masyarakat kategori lansia, disabilitas dan ODGJ yang tidak bisa melakukan perekaman KTP Elektronik di Disdukcapil atau di Kecamatan dapat memiliki KTP Elektronik. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi pelaksanaan program Predator di Kabupaten Sumedang. Masalah di fokuskan pada Evaluasi Program. Adapun acuan teori yang digunakan adalah Dimensi Evaluasi Program dari Brigman dan Davis dalam Tayibnaxis (2000), yang terdiri dari Input, Process, Output, dan Outcome. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi) yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Predator di Kabupaten Sumedang telah berjalan cukup baik dan terdapat beberapa kendala didalam pelaksanaannya seperti sarana dan prasarana yang belum memadai dan belum ada jadwal yang pasti untuk pemberian pelayanan Predator dikarenakan tidak adanya petugas khusus pelayanan Predator sehingga pelayanan diberikan ketika ada permintaan dari pihak Kecamatan.

Kata Kunci: Kebijakan Publik; Implementasi Kebijakan; Evaluasi Program; Predator.

Abstract

The Motor Cycling Electronic ID Card Recording Service Program (PREDATOR) is one of the innovation programs that has the aim of making people into the category of elderly, disabled and ODGJ who cannot record their Electronic ID cards at the Disdukcapil or in the sub-districts have an Electronic ID card. This article aims to determine the evaluation of the implementation of the Predator program in Sumedang Regency. The problem is focused on Program Evaluation. The theoretical reference used is the Program Evaluation Dimension of Brigman and Davis in Tayibnaxis (2000), which consists of Input, Process, Output, and Outcome. Data was collected by means of library research and field studies (observations, interviews, and documentation) which were then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the implementation of the Predator program in Sumedang Regency has been going quite well and there are several obstacles in its implementation such as inadequate facilities and infrastructure and there is no definite schedule for the provision of Predator services due to the absence of special Predator service officers so that services are provided when there is a request. from the District.

Keywords: Public Policy; Policy Impelementation; Program Evaluation; Predator.

How to Cite: Ningrum, D.W.N. & Zamzami, M. (2022). Evaluasi Program Predator Kabupaten Sumedang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5(1): 275-283.



PENDAHULUAN

KTP Elektronik merupakan dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan atau pengendalian baik dari sisi administrasi maupun teknologi informasi dengan berbasis pada *database* kependudukan nasional. Setiap warga negara republik Indonesia wajib memiliki KTP Elektronik karena ini sangat penting bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sasaran dari pembuatan KTP Elektronik merupakan seluruh warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun dan memiliki kartu keluarga. Setiap warga negara Indonesia wajib memiliki KTP Elektronik dengan tanpa adanya diskriminasi terhadap kelompok masyarakat tertentu seperti penyandang disabilitas, lansia dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Untuk mencapai pelayanan yang menyeluruh serta tidak adanya diskriminasi terhadap golongan kelompok masyarakat tertentu dan untuk memaksimalkan kebutuhan KTP Elektronik dengan kategori tersebut seperti ODGJ, lansia, disabilitas dan masyarakat yang tidak bisa datang ke lokasi perekaman KTP Elektronik dikarenakan sakit ataupun rentan usia, maka dibuatkanlah inovasi program Pelayanan Perekaman KTP Elektronik Bersepeda Motor (Predator).

Program Predator memberikan inovasi bagi masyarakat yang tidak bisa datang ke lokasi perekaman KTP Elektronik karna kondisi tertentu. Sehingga pemerataan pembuatan KTP Elektronik bisa dilaksanakan kepada masyarakat tanpa adanya diskriminasi, dan manfaat dari pembuatan KTP Elektronik bisa dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat. Tujuan utama dari pembentukan program Predator ini yaitu untuk mencapai pelayanan yang menyeluruh dan tidak adanya diskriminasi terhadap golongan atau kelompok masyarakat tertentu.

Evaluasi program predator sangat dibutuhkan dalam menilai kinerja dari program tersebut sejauhmana kebermafaatan dari program tersebut dan apa saja kendala yang dihadapi ketika melaksanakan program. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Widoyoko (2012) bahwa melalui evaluasi suatu program dapat dilakukan penilaian secara sistematis, rinci, dan menggunakan prosedur yang sudah diuji secara cermat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Widodo dalam Sayekti (2019) yang menyatakan bahwa melalui evaluasi, terdapat beberapa rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk program mendatang, yaitu: untuk melanjutkan atau pun tidak melanjutkan program; program perlu diteruskan, namun perlu perbaikan pada prosedur dan penerapannya; perlu menambah atau mengembangkan strategi program yang spesifik dan teknik-teknik yang mendukung; program perlu diterapkan di tempat lain; perlu mengalokasikan sumberdaya-sumberdaya langka pada program-program yang kompetitif; perlu menolak atau menerima teori atau pendekatan kebijakan program.

Setiap kegiatan yang dilaksanakan mempunyai tujuan tertentu, demikian juga dengan evaluasi. Menurut Arikunto (2004) ada 2 tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara keseluruhan sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masing-masing komponen.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi program menurut Sudjana (2006) yaitu: (1) Sebuah perencanaan program sangat penting dalam menyusun sebuah program, perencanaan tersebut mencakup komponen, proses dan tujuan program. Keberhasilan program bisa diukur apakah pelaksanaan program sudah sesuai atau belum dengan perencanaan program; (2) Setelah program terlaksana maka penting diadakan evaluasi untuk mengetahui ketepatan pelaksanaan program sesuai dengan rencana. Dari evaluasi tersebut dapat diidentifikasi kebutuhan tentang perlunya perluasan, perbaikan, peningkatan atau penghentian program; (3) Informasi yang berkaitan dengan penerimaan program dan komponen-komponennya akan sangat penting bagi pengambil keputusan tentang perlunya modifikasi atau perbaikan program dan untuk melihat keunggulan program dibandingkan dengan program lain sehingga bisa dipertahankan; (4) Evaluasi dilakukan untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan dari sebuah program dengan menggunakan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*). Penyajian data dapat digunakan pengambil keputusan untuk mengubah kelemahan menjadi kekuatan dan ancaman menjadi peluang; dan (5) Hasil evaluasi tidak hanya digunakan pengambil keputusan untuk kebijakan sebuah program, tetapi juga

diharapkan bisa memberikan motivasi terhadap pembina, pengelola, dan pelaksanaan program agar dapat menampilkan kinerja yang lebih baik.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Hidayah (2016) menunjukkan bahwa faktor yang mendukung program adalah antusiasme kelompok sasaran dan dukungan pelaksana program menjadi modal utama dalam pengembangan program. Selanjutnya hasil penelitian Pambudi (2018) menunjukkan bahwa faktor penghambat dalam evaluasi program adalah masih minimnya sumber daya manusia yang ada, sarana dan prasarana yang ada masih banyak memiliki kekurangan, dan sosialisasi yang masih belum berhasil. Adapun hasil penelitian Pelita dan Widodo (2020) menjelaskan bahwa faktor pendukung pelaksanaan program adalah dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana, sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya kepekaan dan pengetahuan dari petugas pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka perlu dilakukannya analisis mendalam mengenai program Predator dalam bentuk evaluasi pelaksanaan program Predator. Dalam melakukan evaluasi program Predator menggunakan teori evaluasi program menurut Brigman dan Davis dalam Tayibnapi (2000), yang terdiri dari Input, Process, Output, dan Outcome. Sehingga yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana hasil evaluasi inputs, process, outputs, dan outcomes dari pelaksanaan program Predator?

Adapun tujuan dari evaluasi program Predator adalah untuk mengetahui evaluasi kinerja program Predator ini dalam penerbitan E_KTP bagi masyarakat lansia, disabilitas dan ODGJ yang ada di Kabupaten Sumedang. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kabupaten Sumedang dalam mengimplementasikan program Predator.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2017).

Sasaran penelitian merupakan Pegawai Bidang pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang. Penentuan informan penelitian menggunakan teknik sampling berupa purposive sampling. Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sehingga yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah Kasi Identitas Penduduk, Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Seksi Identitas Penduduk, dan petugas pencatatan identitas penduduk. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi) sedangkan pengolahan data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi *Input*

Stufflebeam dan Shinkfield dalam Yana, Sella, Prihatin dan Deris (2018) menjelaskan Orientasi utama evaluasi input adalah menentukan cara bagaimana tujuan program dicapai. Evaluasi masukan dapat membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Indikator dari dimensi input ini terdiri dari sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta teknologi.

Adapun hasil wawancara dengan empat orang informan penelitian dapat dilihat pada Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Wawancara Evaluasi *Input*.

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Wawancara Evaluasi Input

No	Informan	Jawaban Wawancara
1	Gin Gin Erma Hidayat, S.S (Kepala Seksi Identitas Penduduk)	<p>Mengenai masalah SDM pihak Dinas tidak mengkhususkan diri akan tetapi memang idealnya harus punya SDM tenaga khusus untuk program Predator. Karena program Predator itu sendiri berurusan dengan orang-orang yang sakit, disabilitas dan yang kurang bisa berkomunikasi. Idealnya petugas Predator harus yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut.</p> <p>Untuk anggaran, Dinas tidak memiliki anggaran khusus untuk program Predator akan tetapi menggunakan anggaran di bidang pelayanan pendaftaran penduduk. Untuk Sarana dan prasarana sudah tersedia, tetapi karena proses perekaman oleh Predator rata-rata dilakukan di pelosok jadi kekuatan sinyal atau jaringan komunikasi yang cenderung menjadi kendala.</p>
2	Yuyun Tarmed, S.Pd (Petugas Predator 1)	<p>Jumlah Petugas yang menangani program Predator dirasa sudah cukup. Untuk sarana dan prasana seperti kendaraan bermotor masih sangat layak digunakan karena masih baru. Untuk alat-alat perekaman KTP Elektronik ada empat yaitu, retina scanner, signature pad, kamera, dan fingerprint, keempat alat ini masih dapat digunakan dengan baik.</p> <p>Terkait teknologi ada kendala yang dihadapi petugas lapangan, yang pertama keadaan sinyal dilokasi yang kurang mendukung, kedua ada alat baru dari pemerintah tetapi belum bisa digunakan karena aplikasi yang digunakan untuk alat tersebut tidak mendukung karena masih menggunakan versi yang lama. Ketiga terkadang terjadi kendala dalam pengoperasian aplikasi perekaman data sehingga harus menunggu untuk dibenarkan oleh petugas yang menangani server aplikasi tersebut.</p>
3	Agus Nono Suhartono, S.Kom (Petugas Predator 2)	<p>Dari sisi SDM program Predator kekurangan jumlah petugas. Tidak ada tim khusus untuk program Predator ini dikarenakan semua petugas merangkap sebagai petugas lapangan Predator juga sebagai petugas pelayanan dikantor seperti di bidang Capil, Dafduk, dan Piak. Adapun kendalanya ialah kekurangan jumlah SDM untuk program Predator ini.</p> <p>Dari sisi anggaran program Predator ini mengalami pengurangan di karenakan kebijakan PPKM yang mengharuskan adanya pengurangan kegiatan dan adanya pelimpahan sebagian anggaran untuk penanganan pandemi covid-19.</p> <p>Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program Predator ini belum sepenuhnya sesuai dan masih terdapat banyak hambatan. Adapun hambatan-hambatannya yaitu, pertama masih terbatasnya sarana dan prasarana, kedua dari sisi keterbatasan itu dipaksakan untuk tetap dapat memberikan pelayanan, ketiga masalah layak tidak layak jelas kurang layak, tapi yang penting moto dan mutu pelayanan tercapai, bukan berarti memberi pelayanan asal-asalan tapi disesuaikan untuk memberikan pelayanan yang bagus dan seefisien mungkin. Contoh hambatan sarana prasarana untuk program ini ialah keterbatasan alat. Jadi program ini hanya memiliki 1 alat, yang mana alat tersebut harus dipakai bergiliran oleh petugas Predator. Dari sisi teknologi alat yang dipakai masih menggunakan alat model lama sehingga masih kurang maksimal dalam penggunaan teknologinya.</p>
4	Ajat Sudrajat, S.Kom (Petugas Predator 3)	<p>Sumberdaya manusia yang terlibat dalam program Predator sudah dapat dikatakan memenuhi untuk dapat melaksanakan program tersebut, Dari segi anggaran untuk program Predator ini tidak ada anggaran yang dikhususkan bagi program Predator itu sendiri jadi dalam segi anggaran belum sama sekali maksimal.</p> <p>Sarana dan prasana yang digunakan dalam program Predator ini</p>

sudah dikatakan memenuhi dan juga cukup layak, hambatan yang dihadapi hanya dalam bentuk kendaraannya saja seharusnya kendaraan yang digunakan yaitu motor xmax dapat dilengkapi dengan box yang berada dibelakang jok motor agar alat-alat yang dibutuhkan dapat dimasukkan kedalam box tersebut, namun melihat medan-medan yang dilewati saat terjun ke lokasi yang dituju sangat lumayan beresiko takutnya malah terjadi kerusakan pada barang yang diperlukan jadi tidak menggunakan box tersebut.

Dari segi alat-alat yang berbasis teknologi itu masih kurang memenuhi kebutuhan, hambatan yang sering terjadi dari segi jaringan karena pada saat datang ke lokasi tidak mengetahui bagaimana kondisi sinyalnya, pernah ada pada saat datang ke lokasi yang dituju sinyalnya tidak mendukung namun tetap kita lakukan rekam secara offline lalu untuk memasukan data-datanya nanti dilakukan secara online karena harus tetap menggunakan jaringan.

Sumber: Hasil Penelitian 2021

Berdasarkan tabel Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Wawancara Evaluasi *Input*, maka hasil penelitian menunjukkan hal sebagai berikut: Pertama, sumber daya manusia dalam pelaksanaan program Predator masih kurang. Tidak adanya petugas khusus yang mengurus pencatatan identitas bagi sasaran Predator. Petugas yang disediakan adalah mereka yang bertugas sehari-sehari melakukan pencatatan identitas bagi masyarakat umum di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang sehingga seringkali petugas pencatatan identitas yang mendapatkan jadwal untuk pelaksanaan program Predator tidak bekerja dengan tepat waktu dikarenakan pekerjaan mereka di Dinas masih menumpuk. Hal tersebut menyebabkan keterlambatan memberikan pelayanan kepada target sasaran Predator. Sebagaimana yang dikemukakan Ridwan (2014) bahwa keterbatasan jumlah aparat merupakan salah satu faktor penghambat pelaksanaan.

Kedua, tidak adanya anggaran yang dikhususkan untuk program Predator, melainkan anggaran untuk program tersebut masih menyatu dengan anggaran untuk bidang pelayanan penduduk, yang menjadi hambatan dalam segi anggaran adanya pengurangan dana yang disebabkan terjadinya PPKM karena pandemi covid-19. Sebagaimana disampaikan oleh Tjiptoherijanto dalam Iskandar (2017) bahwa kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan publik lebih sering disebabkan oleh faktor-faktor internal, yaitu lemahnya daya dukung administrasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik, yang mencakup struktur organisasi, kemampuan manajerial, kemampuan keuangan serta jumlah dan kualitas SDM yang tersedia.

Ketiga, sarana dan prasarana sudah cukup baik, misalnya kendaraan yang digunakan untuk melakukan program Predator pun masih layak dan baru hanya saja terkendala di box yang seharusnya diletakan dibelakang jok motor masih belum bisa diterapkan mengingat medan yang dilalui menuju lokasi lumayan beresiko dan peralatan yang digunakanpun masih sangat layak hanya saja petugas harus bergiliran memakainya karena Program Predator masih memiliki 1 alat.

Keempat, dari segi teknologi yang menjadi hambatan utama adalah keadaan sinyal di lokasi yang kurang mendukung dan untuk alatnya masih menggunakan alat model lama. Alat model terbaru juga sebenarnya ada, tetapi belum bisa digunakan secara maksimal karena perangkat teknologi yang digunakan untuk alat tersebut tidak mendukung karena masih menggunakan versi yang lama.

Evaluasi Process

Evaluasi Proses (*Process Of Publik Policy Implementation*) menurut Handoko dalam Huzaipa (2014) berfokus pada petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis). Ukuran keberhasilan kebijakan adalah kesesuaian proses implementasi kebijakan dengan garis petunjuk (guide lines) yang telah ditetapkan. Selain itu Suparman, Sakti dan Engkus (2018)

menjelaskan bahwa evaluasi proses merupakan sumber informasi penting untuk menafsirkan hasil evaluasi produk.

Adapun hasil wawancara dengan empat orang informan penelitian dapat dilihat pada Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Wawancara Evaluasi *Process*.

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Wawancara Evaluasi *Process*

No	Informan	Jawaban Wawancara
1	Gin Gin Erma Hidayat, S.S (Kepala Seksi Identitas Penduduk)	Segi efektivitas susah untuk diukur, karena disdukcapil sendiri tidak memiliki data terkait masyarakat yang tidak bisa datang untuk pelayanan. Jika ada data maka dapat dibandingkan dan diukur efektivitasnya. Jika menghitung efisiensi dari Dinas bisa dikatakan tidak efisien karena pihak dari Dinas harus datang ke lapangan lalu datang langsung ke rumah rumah masyarakat. Sedangkan dari pandangan penduduk, pelayanan melalui program Predator itu efisien karena mereka tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk mendatangi tempat pelayanan melainkan didatangi oleh petugas yang akan memberikan pelayanan. Memberikan pelayanan adalah kewajiban dari dinas jadi tidak memperhitungkan segi efisiensi.
2	Yuyun Tarmedy, S.Pd (Petugas Predator 1)	Sejauh ini program Predator sudah berjalan secara efektif dan efisien bisa dilihat dari antusiasme masyarakat yang mengirim surat atau permohonan untuk mendapatkan pelayanan Predator. Selain itu, tidak terlalu menguras waktu dan tenaga. Untuk waktu pelayanan sekitar 30 menit jika menggunakan komputer jika menggunakan laptop pelayanan bisa berlangsung lebih cepat.
3	Agus Nono Suhartono, S.Kom (Petugas Predator 2)	Program Predator sudah efisien, dengan adanya program Predator ini sudah banyak masyarakat yang terbantu dalam kepemilikan kartu identitas, capaian perekaman penduduk juga sudah tercapai.
4	Ajat Sudrajat, S.Kom (Petugas Predator 3)	Efektivitas dari metode program Predator ini masih kurang baik karena harus menunggu terlebih dahulu data dari desa mengenai orang-orang yang tidak bisa melakukan perekaman secara datang langsung ke tempat, setelah itu baru program Predator bisa dilaksanakan. Namun pelaksanaan program Predator sangat efisien terhadap prosesnya karena bisa dilakukan dengan cepat untuk orang-orang yang memang dikategorikan membutuhkan program Predator, namun untuk metode pengumpulan datanya belum berjalan dengan baik.

Sumber: Hasil Penelitian 2021

Berdasarkan Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Wawancara Evaluasi *Process*, maka hasil penelitian menunjukkan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, Dari segi efektivitas metode masih kurang baik karena disdukcapil tidak mempunyai data pasti masyarakat yang akan melakukan perekaman, jadi harus menunggu data dari desa terlebih dahulu. Di lain sisi, antusiasme masyarakat terhadap adanya pelayanan program Predator sudah cukup baik bisa dilihat dari masyarakat yang membutuhkan banyak mengirim permohonan/surat minta untuk dilayani. Kedua, Pelayanan program Predator yang selama ini berjalan bisa dikatakan sudah efisien karena sudah banyak kategori lansia, disabilitas, dan ODGJ yang terbantu karena tidak perlu datang ke tempat perekaman dan prosesnya juga tidak membutuhkan banyak waktu.

Evaluasi *Outputs*

Outputs memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu. Menurut dalam Widoyoko (2012) fungsi evaluasi hasil adalah membantu untuk membuat keputusan yang berkenaan dengan kelanjutan, akhir dan modifikasi program, apa hasil yang telah dicapai, serta apa yang dilakukan setelah program itu berjalan.



Adapun hasil wawancara dengan empat orang informan penelitian dapat dilihat pada Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Wawancara Evaluasi *Outputs*.

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Wawancara Evaluasi *Outputs*

No	Informan	Jawaban Wawancara
1	Gin Gin Erma Hidayat, S.S (Kepala Seksi Identitas Penduduk)	Terkait data perekaman melalui Predator tidak terpisah secara khusus, akan tetapi masuk ke dalam keseluruhan data perekaman. Program Predator merupakan sebuah cara untuk memberikan pelayanan, mengenai data yang didapat melalui program tersebut tidak akan ada ciri ataupun terpisah secara khusus. Data tahun 2020 dikarenakan PSBB dari Bulan Maret dihentikan, MPP kab sumedang juga ditutup. Pada tahun 2020 petugas Predator mendatangi Desa Cipancar melayani permintaan 4 orang dan 2021 lumayan banyak.
2	Yuyun Tarmedy, S.Pd (Petugas Predator 1)	Untuk data saya tidak memegang data pasti mengenai orang-orang yang dilayani program Predator. Hampir seluruh desa sudah pernah dikunjungi oleh program Predator namun hanya daerah Cibugel dan Jatinunggal karena belum ada surat masuknya.
3	Agus Nono Suhartono, S.Kom (Petugas Predator 2)	Kategori lansia yang terbaru yang sudah dilayani sampai sejauh ini berjumlah 12 orang. Hampir seluruh desa sudah pernah dikunjungi oleh program Predator namun hanya daerah Cibugel dan Jatinunggal karena belum ada surat masuknya. Bagi kategori disabilitas program Predator ini juga sudah mulai masuk ke sekolah-sekolah luar biasa. Data desa terbaru yang sudah dikunjungi adalah Desa Cipacing, Citimun dan Hariang.
4	Ajat Sudrajat, S.Kom (Petugas Predator 3)	Tidak mendata pasti per kategori karena perekaman yang dilakukan biasanya datanya sudah menjadi satu dengan perekaman. Petugas Predator hanya menerima data dari desa jikalau ada desa yang meminta untuk didatangi oleh program Predator tersebut, untuk jumlah perkategorinya saya kurang mengetahui. Sebagian besar desa sudah dikunjungi namun hanya beberapa permintaan aja seperti hanya satu atau dua orang saja yang terdapat di desa tersebut.

Sumber: Hasil Penelitian 2021

Berdasarkan Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Wawancara Evaluasi *Outputs*, maka hasil penelitian menunjukkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tidak memiliki data pasti akan jumlah kelompok sasaran Predator yang telah dilayani. Untuk kategori lansia telah melayani 12 orang, kategori disabilitas yang telah dilayani pada tahun 2020 sebanyak 4 orang dan di tahun 2021 tidak memiliki data pasti jumlah yang dilayani dan begitupun dengan kategori ODGJ tidak ada data jumlah masyarakat yang telah dilayani dalam pembuatan E-KTP melalui program Predator ini.

Dengan tidak adanya data pasti dari jumlah sasaran yang telah dilayani maka menghambat proses evaluasi dikarenakan tidak dapat diketahui pasti program Predator ini telah tepat sasaran atau belum. Sebagaimana yang dikemukakan Badjuri dan Yuwono dalam Nurcholis (2007) bahwa output yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan, dengan indikator tepat tidaknya sasaran yang dituju, berapa besar sasaran yang tercakup, seberapa banyak kelompok sasaran yang tertangani, dan seberapa besar kelompok yang terlibat.

Evaluasi *Outcomes*

Evaluasi outcomes digunakan untuk mengukur keberhasilan program dalam mencapai tujuannya. Tailor dan Hendircks dalam Winarno (2016) menjelaskan outcomes adalah respon partisipan terhadap pelayanan yang diberikan dalam suatu program. Outcomes pada program Predator dapat dilihat dari dampak sosial dan dampak ekonomi.

Adapun hasil wawancara dengan empat orang informan penelitian dapat dilihat pada Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Wawancara Evaluasi *Outcomes*.

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Wawancara Evaluasi *Outcomes*

No	Informan	Jawaban Wawancara
1	Gin Gin Erma Hidayat, S.S (Kepala Seksi Identitas Penduduk)	Masyarakat yang di layani dapat memiliki identitas dengan kepemilikan identitas dapat memberikan kesempatan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. Seperti, berobat menggunakan BPJS. Dalam jangka panjang program Predator itu dapat membantu dalam penerimaan seperti bantuan sosial dari pemerintah.
2	Yuyun Tarmedy, S.Pd (Petugas Predator 1)	Dampak Sosial dari program Predator ini yaitu masyarakat BPJS, bantuan dari Dinas Sosial, semua yang berkaitan dengan data Kemendagri itu akhirnya bisa digunakan untuk bantuan sosial. Dampak ekonomi dari adanya program Predator ini yaitu masyarakat lansia, disabilitas, dan ODGJ kurang mampu dalam mengajukan bantuan-bantuan yang sebelumnya harus menggunakan surat domisili yang diajukan oleh Desa terlebih dahulu, setelah memiliki KTP Elektronik jadi bisa mendapatkan Bantuan ekonomi seperti bansos, zakat dan bantuan bantuan lainnya tanpa harus menunggu diajukan oleh Desa bersangkutan.
3	Agus Nono Suhartono, S.Kom (Petugas Predator 2)	Dampak sosial yang diterima masyarakat akan adanya program Predator ini dapat dilihat dari alasan utama masyarakat antusias dengan program Predator ini, yaitu agar bisa berobat atau mendapatkan program pelayanan kesehatan gratis. Dampak ekonomi dari program Predator yaitu masyarakat yang kurang sehat dan kurang mampu menjadi terbantu dalam pengobatannya dan yang kurang mampu menjadi terbantu.
4	Ajat Sudrajat, S.Kom (Petugas Predator 3)	Meringankan masyarakat yang berkategori lansia, disabilitas, dan ODGJ untuk mendapatkan bantuan kesehatan, seperti BPJS karena untuk mendapatkan BPJS dan JAMKESDA memerlukan identitas. Dampak ekonominya, sebenarnya bukan ranah dan kewenangan program Predator. Program Predator hanya sampai ke tahap membantu perekaman dan pembuatan identitas/KTP Elektronik. Tetapi ada dari pihak desa masyarakat tersebut yang menginformasikan bahwa salah satunya untuk mendapatkan bansos.

Sumber: Hasil Penelitian 2021

Berdasarkan Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Wawancara Evaluasi *Outcomes*, maka hasil penelitian menunjukkan dengan Adanya program Predator dapat membantu masyarakat khususnya orang-orang yang berkategori lansia, disabilitas dan ODGJ untuk bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan dan juga bisa didaftarkan sebagai penerima bantuan sosial. Dampak sosial menurut Fardani (2012) adalah sebuah bentuk akibat atau pengaruh yang terjadi karena adanya sesuatu hal. Pengaruh yang dimaksud adalah akibat yang terjadi pada masyarakat, baik karena suatu kejadian itu mempengaruhi masyarakat atau hal lainnya di dalam masyarakat.

Adapun dampak ekonomi dari adanya program Predator berdampak pada adanya bantuan sosial baik berupa uang ataupun sembako bagi masyarakat yang terdaftar karena sudah memiliki KTP Elektronik. Dampak Ekonomi dijelaskan Cohen dalam Dwi (2015) sebagai akibat dari suatu perubahan yang terjadi di lingkungan.

SIMPULAN

Hasil evaluasi program Predator di Kabupaten Sumedang bahwa pelaksanaan program Predator berjalan dengan cukup baik. Beberapa aspek menunjukkan hasil yang belum baik diantaranya seperti sumberdaya manusia yang tidak memiliki pegawai yang ditugaskan khusus untu menangani program Predator. Tidak adanya anggaran yang dikhususkan untuk program Predator. Teknologi yang digunakan dalam melakukan perekaman data diri penduduk masih menggunakan peralatan yang lama dan tentunya tidak bisa cepat dalam merekam data penduduk. Efektivitas metode yang digunakanpun masih belum efektif karena hanya menunggu



permintaan dari Desa sehingga belum seluruh masyarakat kategori disabilitas dan ODGJ di Kabupaten Sumedang yang memiliki E-KTP. Selain itu, tidak adanya data akurat yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang terkait jumlah penyandang disabilitas dan ODGJ yang belum terlayani dan yang sudah terlayani.

Namun, program Predator di Kabupaten Sumedang tetap memiliki manfaat dalam pelaksanaannya dengan adanya program Predator ini pun membantu masyarakat di Kabupaten Sumedang yang berkategori lansia, disabilitas, dan ODGJ untuk memiliki E-KTP. Dengan adanya E-KTP bagi ketiga kategori tersebut mampu membantu mereka untuk mendaftarkan diri mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan Daerah serta membantu mereka untuk mendapatkan fasilitas kesehatan di Kabupaten Sumedang maupun di luar Kabupaten Sumedang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2004). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dwi P., Rahmat. (2015). Dampak Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Penambangan Batubara Ilegal Di Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim. *Skripsi*. Universitas Sriwijaya.
- Fardani, Andi. (2012). Dampak Sosial Keberadaan PT Vale Indonesia Tbk Terhadap Kehidupan Masyarakat (Studi Kasus Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur). *Skripsi*. Universitas Hasanuddin.
- Hidayah, Nur. (2016). Evaluasi Pelaksanaan Program Ibu Mandiri (PRIMA) dalam Pemberdayaan Ekonomi Kaum Perempuan di Yayasan Sahabat Ibu Yogyakarta Periode 2014. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Huzaifa, H. (2014). Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. *Katalogis*, 2(7): 158-169. Diunduh di <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6917> tanggal 17 Januari
- Iskandar, D. T., Sumartono, S., & Domai, T. (2016). Evaluasi Program Pembinaan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Ponorogo. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 1(1): 17-22. Di unduh di <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpsi/article/view/2238> tanggal 17 Januari
- Nurcholis, H. (2007). *Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Pambudi, Dimas Rian. (2018). Evaluasi Program Quick Wins Pada Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Suku Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara. *Skripsi*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Pelita, A. C., & Widodo, H. (2020). Evaluasi Program Sekolah Adiwiyata di Sekolah Dasar Muhammadiyah Bantul Kota. *Sekolah Dasar: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan*, 29(2): 145-157. Diunduh di <file:///C:/Users/ACER%20V5-132/Downloads/15902-53912-1-PB.pdf> tanggal 24 Maret
- Ridwan, M. (2014). Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang. *Administrative Reform*, 2(2): 1341-1354. Diunduh di <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/IAR/article/view/510/463> 20 Januari
- Sayekti, L. (2019). Evaluasi Program Desa Mandiri Energi Berbasis Biogas di Desa Mekarjaya. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 7(2): 26-41. Diunduh di <https://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma/article/view/2956> tanggal 18 Januari
- Sudjana, Djudju. (2006). *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suparman, N., Sakti, F., & Engkus, E. (2018). Evaluasi Program Keluarga Berencana pada Era Desentralisasi di Kuningan Jawa Barat. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 6(2): 122-131. Diunduh di <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/1781> tanggal 20 Januari
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Winarno, Budi. (2016). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS (Center Off Academic Publishing Service).
- Yandra, A., Setiawan, H., Sella, N., Prihati, P., & Derin, T. (2020). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2): 168-176. Diunduh di <https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/njip/article/view/119> tanggal 17 Januari